

UPAYAMAHASISWA KKNT UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI DALAM
MEMECAHKAN PERMASALAHAN PENERBITAN SPPT PBB DI DESA
SUKADAMAI KECAMATAN JEROARU

Hairul Maksum

Fakultas Hukum Universitas GunungRinjani
e-mail: hairulmaksum71@gmail.com

Abstrak

Dalam Upaya menjalankan kewajiban tridarma perguruan tinggi di Universitas Gunung Rinjani ada beberapa program kemahasiswaan yang dapat dijalankan diantaranya adalah program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Program KKNT (kuliah kerja nyata tematik) kali ini dapat dikatakan sebagai bentuk program yang bersifat khusus dalam pelaksanaannya, karena program tersebut di khususkan dalam memberdayakan Masyarakat pada skup yang lebih khusus yaitu kekadusan (Dusun Mandiri) di setiap desa tujuan KKN, dalam hal ini salah satunya adalah Desa Sukadamai Kecamatan Jeroaru Kabupaten Lombok Timur. Dalam menjalankan program KKN oleh mahasiswa di desa Sukadami sebenarnya ada banyak program yang telah dijalankan seperti Pertanian, Ekonomi, Kenbersihan, Adminduk dan Penyuluhan pentingnya penerbitan SPPT-PBB. Dari sekian banyak program, tersebut yang tidak kalah pentingnya dinilai banyak memberikan dampak yang cukup baik kepada Masyarakat adalah berkaitan dengan dijalkannya program penerbitan SPPT PBB yang melibatkan instansi terkait yang menangani masalah tersebut yaitu Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Timur. Dalam pelaksanaannya program tersebut ternyata diikuti secara atusias oleh Masyarakat setempat, termasuk oleh seluruh kepaladusun di lingkup pemerintahan desa Sukadamai, karena dalam program tersebut dapat secara langsung diterbitkan SPPT-PBB (pajak bumi dan bangunan) kepada masyarakat yang belum memiliki SPPT. Penyuluhan mengenai pentingnya penerbitan SPPT-PBB dapat memberikan pemahaman bermakna tentang pentingnya kewajiban membayar pajak kepada negara untuk Pembangunan, sehingga atas terseleenggaranya salah satu program KKN tersebut dapat memberikan salah satu solusi yang berharga bagi Masyarakat tujuan KKN, dan juga dipastikan dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan peningkatan pendapatan daerah.

Kata kunci: Mahasiswa KKNT, Upaya, Penerbitan, SPPT PBB

PENDAHULUAN

Universitas Gunung Rinjani merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup terkenal di NTB, tepatnya berada di kabupaten Lombok Timur. Sejak berdiri dari tahun 1996 sampai saat ini Universitas Gunung Rinjani mempunyai tujuh program studi diantaranya adalah Fakultas hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Bahasa Inggris dan Prodi Akuntansi), Fakultas Perikanan, Fakultas pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik Sipil.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan, Universitas Gunung Rinjani disamping menjalankan fungsi Pendidikan dan penelitian tentunya juga tidak dapat lepas dari bagian Tridharma yang lain yaitu menjalankan kiprahnya dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Dalam menjalankan PKM, mahasiswa dituntut agar mampu menyumbangkan pemikirannya yang telah didapatkan pada bangku kuliah agar dapat diaplikasikan untuk membangun peradaban Masyarakat, terutama Masyarakat pedesaan.

Dalam membangun peradaban Masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini dikemas dalam bentuk KKN Tematik (KKN-T), yang mana dalam pelaksanaan KKN Tematik tersebut berfokus pada Program Dusun Mandiri, yang mengedepankan program-program yang bersifat khusus yang akan ditawarkan pada desa tujuan KKN tersebut, yang tentunya tujuan utamanya adalah untuk membangun dusun yang menjadi tempat focus ber KKN, sehingga setiap program mengedepankan tema unggulan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pada masing-masing kekadusan (Dusun), dengan kata lain KKN-Tematik diharapkan mampu membaca fenomena social dalam Masyarakat dan sekaligus diharapkan mampu menyelesaikan akar masalahnya dengan mencari solusi dari berbagai persoalan tersebut.

Dalam perjalanan KKN, salah satu desa tujuan KKN dari mahasiswa Universitas Gunung Rinjani adalah desa-desa bagian Selatan Kabupaten Lombok timur, salah satunya adalah Desa Sukadamai di Kecamatan Jeroaru. Desa Sukadamai merupakan salah satu desa yang penduduknya Sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian. Desa Sukadamai terdiri dari beberapa dusun, diantaranya adalah Dusun Lingkok Baru yang merupakan salah satu Dusun pilihan tujuan KKN tematik tersebut, dan juga merupakan dusun yang menjadi tempat posko para mahasiswa dalam menjalankan setiap program yang sudah direncanakan. Jumlah peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik "DUSUN MANDIRI" Universitas Gunung Rinjani di Desa Sukadamai adalah 11 orang Mahasiswa yang berasal dari 3 Fakultas, yang terdiri dari 8 orang Fakultas Ekonomi, 2 orang Fakultas Pertanian dan 1 Orang Fakultas Teknik. Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani mengadakan KKN selama 2 bulan yang di mulai dari tanggal 1 juli 2023 sampai 31 agustus 2023, tepatnya di dusun Lingkok Baru. Program-program kerja yang

dihasilkan di Dusun Lingkok Baru Desa Sukadamai tersebut disesuaikan berdasarkan hasil observasi kondisi dan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Desa Sukadamai, berupa program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan spritual, dan bidang kebersihan.

Ada banyak program unggulan yang menjadi focus mahasiswa, diantaranya program pertanian, program ekonomi, program adminduk dan program penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Khusus mengenai pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), dalam pelaksanaannya dengan cara melibatkan intansi yang menangani permasalahan PBB tersebut yaitu dengan menghadirkan petugas dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan mahasiswa KKN dan Pemerintah Desa Sukadamai, dengan harapan agar dapat membantu Masyarakat setempat yang kesulitan atau yang tidak paham bagaimana prosedur pengurusan dan penerbitan SPPT-PBB.

Dalam pemaparan tulisan dalam bentuk pengabdian ini, yang menjadi focus pembahasannya adalah tentang Upaya pemecahan permasalahan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta memberikan pemahaman kepada Masyarakat tujuan KKN tematik tentang pentingnya untuk diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu bentuk bukti penguasaan dan kepemilikan atas objek pajak. Sehingga sasaran penyuluhan ditujukan bagi Masyarakat yang belum mendaftarkan tanah atau bangunannya pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Lombok timur.

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul "*Upaya Mahasiswa KKNT Universitas Gunung Rinjani Dalam Pemecahan Permasalahan Penerbitan SPPT-PBB Di Desa Sukadamai Kecamatan Jeroaru*".



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, tentang pentingnya membayar pajak PBB



Gambar 2. Foto Bersama mahasiswa KKN dengan staf desa dan pejabat instansi yang menjalankan program penyuluhan tentang pentingnya penerbitan SPPT-PBB

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan topik latar belakang diatas, sehingga dapat ditarik rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah bentuk usaha para mahasiswa KKN-Tdi Desa Sukadamai dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya penerbitan SPPT-PBB dan Apa saja keuntungan yang didapatkan oleh Masyarakat Desa Sukadamai setelah diadakannya penyuluhan tentang pentingnya penerbitan SPPT-PBB ?

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan pengabdian ini, mahasiswa terlebih dahulu melakukan pemetaan masalah yang dialami oleh Masyarakat dilokasi KKN, dengan cara observasi dan mendata seberapa banyak dari Masyarakat tersebut yang memiliki lahan pertanian dan yang memiliki bangunan atau rumah yang belum mempunyai SPPT-PBB. Dari hasil pemetaan yang cukup melelahkan ternyata mahasiswa mendapatkan data dari pemerintah desa sukadamai yang menyebutkan bahwa masih banyak Masyarakat yang belum memiliki SPPT-PBB.

Atas dasar permasalahan tersebut sehingga mahasiswa melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Sukadamai agar permasalahan yang dimaksudkan dapat diatasi, dengan cara berusaha supaya dapat menghadirkan petugas pencatat pajak bumi dan bangunan, dalam hal ini dengan menghadirkan petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan bagi Masyarakat setempat yang belum memiliki SPPT-PBB agar dapat diterbitkan langsung pada saat digelarnya penyuluhan. Dengan demikian melalui usaha tersebut diharapkan dapat mempermudah pegurusan SPPT-PBB, sehingga tidak ada lagi ditemukan Masyarakat yang tidak mempunyai SPPT-PBB.

Harapan mahasiswa yang melakukan KKN, dan juga harapan segenap Civitas

Akademika Universitas gunung Rinjani dengan telah diadakannya penyuluhan tentang pentingnya penerbitan SPPT-PBB tersebut, sehingga kemudian hari dapat terlaksana secara berkesinambungan atau secara terus menerus apabila KKN-T telah selesai dijalankan, dengan demikian pelaksanaan KKNT diharapkan benar-benar bermanfaat bagi Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Usaha Mahasiswa KKN-T Desa Sukadamai Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang Pentingnya Menerbitkan Surat Pembitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB)

1. Pengertian Pajak dan Pengertian Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Pajak merupakan suatu bentuk iuran dari Masyarakat yang dibayarkan kepada negara yang menurut undang-undang dapat dipaksakan apabila terhutang dalam pembayarannya. Pajak berfungsi untuk Pembangunan dalam manfaatnya bagi kepentingan seluruh rakyat dan juga untuk mengukur kemandirian suatu negara. Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan arti pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka pemerintah menerapkan berbagai Langkah kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pemasukan dari pajak, diantaranya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. (Hanum 2009). Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah didapatkan dari sektor pajak dan juga retribusi dan sektor pungutan lainnya.

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan:

“Pendapatan asli daerah meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil ikekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 285 UU no. 23 Tahun 2014 tersebut,

untuk meningkatkan usaha Pembangunan suatu daerah, baik daerah Kabupaten dan Propinsi sudah tentu berasal dari seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan dari berbagai sektor, baik dari pendapatan pajak dan non pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan indikator utama dalam memecahkan permasalahan bangsa dan negara, karena secara nyata dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran para wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam turut andil membangun negara. (Suyatmin 2014). Menurut Rantung dalam bukunya, bahwa factor-faktor yang dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan kantor pajak, kemudahan system pembayaran pajak, lingkungan tempat tinggal wajib pajak, dan usaha sosialisasi tentang perpajakan. (Rantung 2009).

Usaha memberikan pengetahuan pada wajib pajak merupakan salah satu factor pendukung dalam pelaporan tentang pajak, baik itu wajib pajak dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah (UMKM) dan juga untuk wajib pajak yang berkaitan dengan Bumi dan Bangunan. Dengan dibekalinya pengetahuan bagi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak tersebut, karena dengan ketaatan membayar pajak mereka menyadari keikutsertaannya dalam membangun negara.

Dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pengelolaan tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga setiap kabupaten atau kota bisa berkembang dengan baik apabila mampu mengelola pajak tersebut dengan baik pula, sehingga untuk mencapai target pemungutan pajak yang maksimal membutuhkan berbagai macam strategi, termasuk melakukan

penyuluhan kepada Masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dengan demikian diharapkan kepada Masyarakat untuk dapat proaktif menerbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan mereka agar target pungutan pajak bagi pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai.

2. Upaya Nyata Mahasiswa KKN-T Di Desa Sukadamai Melaksanakan Penyuluhan Tentang Pentingnya Wajib Pajak Memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Dengan Melibatkan Instansi Terkait

a. Tujuan Sosialisasi Penerbitan SPPT-PBB & Dasar Hukumnya

Salah satu tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi Masyarakat pedesaan yang dijadikan wilayah pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara maksimal. Berkaitan dengan maksud tujuan KKN tersebut diharapkan segala perencanaan tentang program kerja dapat dijalankan dengan baik sesuai yang perencanaan, yang mana rencana pelaksanaan KKN Tematik Dusun Mandiri di Desa Sukadamai tersebut sesuai rencana berlangsung selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 1 juli s/d tanggal 31 agustus tahun 2023. Adapun beberapa rencana kerja yang sudah dilaksanakan yaitu :Administrasi Kependudukan, Pembibitan, dan Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal pelaksanaan salah satu program KKN diantaranya adalah berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kepada negara bagi terlaksananya Pembangunan secara berkesinambungan. Terkait dengan problematika Masyarakat tentang bagaimana solusi penerbitan

SPPT_PBB secara cepat, maka sosialisasi tentang pemungutan PBB harus digalakkan segenap stakeholder yang membidangi masalah tersebut. Berkaitan dengan bagaimana prosedur dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka landasan hukum yang digunakan sudah lengkap sehingga payung hukum tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi yang menjalankan tugas dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
- b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Keputusan DIRJEN Pajak No. Kep-16/PJ.6/1998 tentang petunjuk Tehknis Penilaian Individual;
- d. Keputusan Mneteri Keuangan No. 523/KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar Pengenaan pajak;
- e. Keputusan DIRJEN Pajak No. 533/PJ/2000 tentang petunjuk pelksana pendaftaran, pendataan nilai objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau Pemeliharaan basis data manajemen informasi objek pajak;

Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan bangunan dianggap program KKN yang paling strategis di desa Sukadamai Kecamatan Jeroaru karena berdasarkan hasil observasi di lapangan ternyata masih banyak Masyarakat yang belum memiliki SPPT yang berkaitan dengan sawah, kebun, ataupun rumah. Dengan demikian penyuluhan tentang halt ersebut yang digagas oleh mahasiswa KKN Universitas

Gunung Rinjani sesuai rencana, diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai target dan sasaran penyuluhan.

b. Capaian Program

Dari kegiatan sosialisasi dimaksud dapat dicapai sesuai target yang direncanakan dengan melibatkan berbagai unsur Masyarakat, seperti proaktifnya segenap unsur pemerintahan desa sukadamai seperti Kepala desa, kepala dusun dan Masyarakat sekitar dalam mendukung terlaksananya program penyuluhan. Dari hasil capaian program dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat yang dapat menghadiri penyuluhan, dan dapat dilihat dari tanggapan positif para kepala dusun di desa sukadamai setelah selesai penyuluhan, yang mana Para Kepala Dusun dalam tanggapannya menyatakan dengan program KKNT tersebut mereka merasa terbantu dan merasa puas karena dapat terbantu masyarakatnya dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Dari hasil capaian yang dapat memberi dampak positif tersebut, sehingga diharapkan kedepan agar petugas yang membidangi masalah tersebut dapat memberikan pelayanan dengan baik secara terus menerus yang tujuannya agar tercipta hubungan yang baik antara Masyarakat dan penyelenggara negara. Atas dasar itu dengan demikian diharapkan dari hasil capaian program tersebut masyarakat yang membutuhkan penerbitan SPPT tidak perlu lagi datang ke kantor BAPENDA kabupaten Lombok timur di selong yang terbilang cukup jauh jarak tempuhnya dari desa sukadamai,

Dalam usaha penyuluhan tentang sosialisasi perpajakan PBB di wilayah Kabupaten Lombok Timur

yang melibatkan pihak BAPENDA Lombok Timur, sehingga dapat dicapai sebuah tujuan. Dengan diadakan penyuluhan dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala bagi Masyarakat dalam membayar pajak, apakah sengaja tdk mau membayar pajak ataukah memang tidak tau bagaimana prosedur membayar pajak tersebut. Hasil dari interaktif dari Masyarakat setempat, ternyata banyak Masyarakat yang tidak memahami prosedur pengurusan penerbitan SPPT, sehingga Untuk menjawab keluhan Masyarakat desa Sukadamai yang tidak memahami prosedur pengurusan SPPT, pada saat pelaksanaan penyuluhan, petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur secara bersamaan memberikan pemahaman tentang tata cara penerbitan SPPT tersebut dan sekaligus melayani penerbitan SPPT secara langsung bagi Masyarakat desa sukadamai, sehingga dinilai cukup membantu Masyarakat setempat.

SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak merupakan indikator utama dalam memecahkan permasalahan bangsa dan negara, karena Secara nyata dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran para wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam turut andil membangun negara. Factor-faktor yang dapat memepengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan kantor pajak, kemudahan system pembayaran pajak, lingkungan tempat tinggal wajib pajak, dan usaha sosialisasi tentang perpajakan.

Dalam hal pelaksanaan salah satu program KKN diantaranya adalah berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kepada negara bagi terlaksananya Pembangunan secara berkesinambungan.

Terkait dengan problematika Masyarakat tentang bagaimana solusi penerbitan SPPT_PBB secara cepat, maka Penyuluhan atau sosialisasi tentang bagaimana prosedur pemungutan PBB harus digalakkan segenap stakeholder yang membidangi masalah tersebut. Berkaitan dengan bagaimana prosedur dan tatacara pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam usaha penyuluhan tentang perpajakan PBB di wilayah Kabupaten Lombok Timur oleh mahasiswa KKN dengan cara melibatkan pihak BAPENDA Lombok Timur, sehingga dapat dicapai sebuah tujuan yang diharapkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan diadakan penyuluhan dapat diketahui apasaja yang menjadi kendala bagi Masyarakat dalam membayar pajak, apakah sengaja tdk mau membayar pajak atautkah memang tidak tau bagaimana prosedur membayar pajak tersebut. Hasil dari interaktif dari Masyarakat setempat, ternyata banyak Masyarakat yang tidak memahami prosedur pengurusan penerbitan SPPT, sehingga Untuk menjawab keluhan Masyarakat desa Sukadamai yang tidak memahami prosedur pengurusan SPPT, pada saat pelaksanaan penyuluhan, petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur secara bersamaan memberikan pemahaman tentang tata cara penerbitan SPPT tersebut dan sekaligus melayani penerbitan SPPT secara langsung bagi Masyarakat desa sukadamai, sehingga dinilai cukup membantu Masyarakat setempat.

Dari hasil capaian program dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat yang dapat menghadiri penyuluhan, dan dapat dilihat daritanggapan positif para kepala dusun di desa sukadamai setelah selesai penyuluhan, yang mana Para Kepala Dusun dalam tanggapannya menyatakan dengan program KKNT tersebut mereka merasa terbantu dan merasa puas karena dapat terbantu masyarakatnya dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

SARAN

Dari hasil temuan mahasiswa yang menjalankan KKN Tematik di Desa Sukadamai Kecamatan Jeroaru, ternyata

bagai temuan yang di dapatkan terkait kebutuhan Masyarakat dalam bidang social kemasyarakatan, salah satunya adalah mengenai keterbatasan pengetahuan Masyarakat tentang bagaimana cara penerbitan SPPT yang berkaitan dengan pajak bumi dan Bangunan mereka. Dalam hal pentingnya pentingnya Upaya penerbitan SPPT tersebut ternyata yang paling dibutuhkan oleh Masyarakat setempat adalah kepekaan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal supaya Masyarakat tidak ada menunggak pembayaran pajak.

Untuk mencapai target dalam pembayaran pajak ataupun retribusi yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur, maka butuh sebuah Lembaga yang menangani masalah tersebut sampai di tingkat Desa. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga saran penulis terkait kepada pemerintah, agar pemerintah berusaha untuk mampu mengadakan atau membangun kantor perkawilan BAPENDA di setiap kecamatan atau bahkan di setiap desa di kecamatan jeroaru, mengingat jarak kota kabupaten cukup jauh dengan jarak desa-desa di kecamatan jeroaru.

Demikianlah, dari hasil pengabdian mahasiswa KKN Universitas Gunung Rinjani diharapkan dapat menjadi salah satusolusi dalam menjembatani kesenjangan pelayanan administrasi perpajakan, agar kedepan tidak ada lagi Masyarakat yang tidak mengerti bagaimana tata cara membayar pajak PBB dan tidak ada lagi Masyarakat yang tidak memiliki SPPT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya KKN Tematik di Desa Sukadamai Jeroaru, maka penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya, terutama kepada Rektor Universitas Gunung Rinjani yang banyak memberikan kontribusi dalam Pembangunan pendidikan, dan juga terimakasih penulis ucapkan kepada LPPM Universitas Gunung Rinjani yang telah dapat merekomendasikan penulis untuk dapat menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN, sehingga penulis mampu

berkiprah dalam membimbing mahasiswa dalam menjalankan pengabdian mereka pada masyarakat walaupun disana sini penuh kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan itu pula, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga atas terselenggaranya KKN tersebut, dalam hal ini kepada Kepala Desa Jeroaru dan segenap perangkat desa yang telah dengan sukarela memberikan segala kemudahan kepada mahasiswa kami dalam menjalankan program-program mereka sehingga dapat terlaksana dengan baik segala rencana kerja .

DAFTAR PUSTAKA

Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil

Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 10(1), 1–6.

Suyatmin (2014), Pajak dan Pembangunan.

Rantung, T. V. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Castleman, K. R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey

Buku Petunjuk Pelaksanaan KKN Tematik (2023). Penerbit LPPM Universitas Gunung Rinjani.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan